

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembuatan laporan keuangan oleh perusahaan sebagai gambaran kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya . Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi perusahaan. Laporan tersebut memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal untuk mengambil keputusan. Keputusan dari pihak internal misalnya, keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Keputusan dari pihak eksternal misalnya keputusan untuk membeli atau menjual investasi mereka di dalam perusahaan atau keputusan untuk memberikan kredit kepada perusahaan.<sup>1</sup>

Laporan keuangan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip - prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat dipertanggung jawabkan isinya serta bermanfaat bagi penggunanya . Dimana tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada periode tertentu dan memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengintepretasikan kondisi dan potensi suatu usaha.

---

<sup>1</sup> Watts, Zimmerman JL., 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey.

Suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi berbagai elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabiliti/kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, serta arus kas. Laporan keuangan juga akan lebih bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*Accounting Principle Board Statement No.4*) yaitu relevan, jelas dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi juga dihadapkan pada keterbatasan atau biasa disebut dengan *constraint* yaitu, *cost-benefit relationship*, *materiality principle*, *industry practice* dan *conservatism*.

Dalam upaya untuk menyempurnakan laporan keuangan tersebut lahirlah konsep konservatisme. Konsep ini mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi.<sup>2</sup>

Salah satu prinsip yang dianut dalam proses pelaporan keuangan adalah prinsip konservatisme. Penggunaan prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dimasa yang akan datang, sehingga pengukuran dan pengakuan untuk angka-angka tersebut dilakukan dengan hati-hati.

---

<sup>2</sup> Sari, Cynthia dan Desi Adhariani, 2009. "Konservatisme Akuntansi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." Makalah SNA XII.

Konservatisme merupakan konvensi laporan keuangan yang penting dalam akuntansi, sehingga disebut sebagai prinsip akuntansi yang dominan. Konvensi seperti konservatisme menjadi pertimbangan dalam akuntansi laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilengkapi oleh ketidakpastian. Masalah konservatisme merupakan masalah penting bagi investor, dan menurut (Wolk, 2002) terdapat indikasi kecenderungan peningkatan konservatisme secara global.

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya.

Di Indonesia tercatat perusahaan Indofarma tersangkut kasus skandal *overstated* dalam penyajian laporan keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan BAPEPAM terbukti PT Indofarma Tbk melaporkan Nilai Barang Dalam Proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (*overstated*) dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28.870.000.000,00. Akibat *overstated* persediaan sebesar Rp 28.870.000.000,00 tersebut, maka Harga Pokok Penjualan akan *understated* dan menyebabkan laba bersih juga akan mengalami *overstated* dengan nilai yang sama pula (BAPEPAM, 2004).

Di kalangan para peneliti, prinsip konservatisme akuntansi masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak - kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak.<sup>3</sup>

Kebebasan manajemen dalam memilih metode akuntansi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda di setiap perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan tersebut atau dengan kata lain perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ditawarkan dalam standar akuntansi keuangan yang dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan.

Banyak kritik mengenai kegunaan konsep konservatisme berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena penggunaan metode yang konservatif akan menghasilkan angka-angka yang cenderung bias dan tidak mencerminkan realita.<sup>4</sup> menyatakan bahwa semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan, maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi antar waktu).

---

<sup>3</sup> Watts RL, 2003a. Conservatism in Accounting Part 1 : Explanation and Implication. *Accounting Horizons* 17 (3): 207-221.

<sup>4</sup> Monahan, 1999. Conservatism, Growth and The Role of Accounting Numbers in the Equity Valuation Process. <http://www.ssrn.com>.

Kondisi ini mendukung simpulan bahwa laporan keuangan itu sama sekali tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya.

Banyak pro kontra yang terjadi ketika kita membicarakan konservatisme. Konservatisme dianggap menjadi suatu prinsip yang justru membuat informasi suatu laporan keuangan menjadi bias karena konservatisme pada dasarnya mengakui rugi lebih cepat dan laba lebih lambat. Hal ini akan membuat suatu laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Di sisi lain, konservatisme dianggap perlu untuk digunakan untuk mencegah kecenderungan manajemen dalam menilai aset perusahaan secara *overstated* agar kinerjanya dinilai baik dan harga saham perusahaan dapat meningkat. Konservatisme juga dianggap bisa menyelesaikan masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan dimana masing-masing agen akan berusaha untuk memenuhi kepentingannya.

Belum selesai dibicarakan mengenai prinsip konservatisme sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan atau tidak, muncul sebuah tema baru mengenai konservatisme. Beberapa tahun terakhir banyak dibicarakan mengenai perubahan standar akuntansi yang menjadi pedoman praktik akuntansi di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sebagian masih mengacu pada *United State Generally Accepted Accounting Principles* (USGAAP) menjadi *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Sebenarnya sejak tahun 1994 sebagian PSAK sudah mengacu pada *International Accounting Standard* (IAS) atau sekarang kita kenal sebagai IFRS, tetapi ada juga yang masih mengacu pada US GAAP. Pada tahun 2006, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam *The Group of Twenty* (G20) memulai wacananya dalam melakukan konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi yang sudah berlaku sebelumnya.

Tujuan penggunaan IFRS adalah untuk membuat laporan keuangan di semua negara mengacu pada suatu standar utama yang sama agar pada akhirnya sebuah laporan keuangan bersifat dapat diperbandingkan dengan penggunaan acuan standar yang sama tersebut. Tujuan tersebut juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengadopsi IFRS. Dengan diadopsinya IFRS, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia pun akan menjadi dapat diperbandingkan dan dapat diterima secara umum oleh negara-negara lain sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan investor asing yang mungkin disebabkan karena perbedaan standar yang diacu.

Dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia, pengukuran atau penilaian, baik aset maupun liabilitas akan menyediakan opsi penilaian dengan *fair value* atau nilai wajar. Sebagian besar pengukuran atau penilaian yang disarankan pada IFRS adalah menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan nilai wajar, meskipun disediakan opsi pilihan lain disamping penggunaan nilai wajar.

Dengan demikian, prinsip konservatisme yang sebelumnya berlaku dalam SAK yang sebagian masih mengacu pada US GAAP seakan-akan berkurang tingkat penerapannya atau dapat dikatakan prinsip konservatisme dihilangkan dan digantikan dengan prinsip yang bernama *prudence*. Yang dimaksud dengan *prudence* dalam IFRS, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dalam IFRS.

*Prudence* seperti pada mulanya selalu menjadi topik yang menjadi perdebatan (Yustina, 2013) . Jika pada mulanya pro kontra yang terjadi adalah mengenai dampak positif dan negatif dari prinsip *prudence* ini. Sekarang, setelah konvergensi IFRS di Indonesia, ada yang menganggap bahwa prinsip ini telah hilang dan ada juga yang menganggap bahwa konservatisme masih ada bahkan meningkat levelnya dalam laporan keuangan setelah SAK mengadopsi IFRS. IASB mengatakan bahwa sebenarnya baik *prudence* maupun konservatisme bukanlah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan sehingga mereka menciptakan IFRS dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi relevan dan andal.

Namun, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tetap harus berhadapan dengan “ketidakpastian” ditengah era IFRS. Hal yang dianggap baik untuk mengatasi ketidakpastian tersebut adalah dengan menganut prinsip *prudence* pada level yang tepat dalam laporan keuangan.

Kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan bahwa proses sosialisasi sangat penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Menurut Tyler terdapat perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum dibagi dua, yaitu instrumen dan normatif. Perspektif instrumental diartikan sebagai individu yang secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian<sup>5</sup> yang menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap penerapan *prudence*. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa struktur kepemilikan, kos politis dan *growth* mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap *prudence*. Hanya satu variabel yaitu *debt covenant* yang diproksikan dengan *leverage* (utang jangka panjang/ total aset). Sedangkan<sup>6</sup> menyimpulkan faktor yang mempengaruhi penerapan *prudence* adalah *debt covenant* dan *political cost*, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi penerapan *prudence* adalah *bonus plan*.

---

<sup>5</sup> Widya, 2004, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Akuntansi Konservatif", Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar: 709-724.

<sup>6</sup> Oktomegah, Calvin. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Prudence* Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol 1, No. 1*.



Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Qiang (2003) yang menemukan bahwa penentu *self imposed conservatism* adalah kontrak hutang (*debt covenant*), *ownership equity*. Ball et al (2000) dan Wibowo (2002) menyatakan bahwa pilihan terhadap suatu metode akuntansi yang terkait dengan prinsip *prudence* dipengaruhi juga oleh struktur kepemilikan, biaya politis dengan menggunakan proksi ukuran perusahaan (Watts dan Zimmerman 1986, dan Cahan, 1992) dan *growth* (Feltham dan Ohlson, 1995, Penman, 2001). Dalam penelitian Dewi (2003) menyatakan bahwa ukuran tingkat *prudence* yang ada belum bisa menangkap atribut-atribut *prudence*.

Penelitian - penelitian yang dilakukan sehubungan dengan adanya konsep *prudence* ini menghasilkan penemuan yang masih beragam. Maka dari itu, penelitian semacam ini masih dibutuhkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *prudence*.

Berdasarkan seluruh penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Prudence*” (Studi pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan dan perdebatan mengenai *prudence* yang masih terus berlanjut.
2. Kebebasan manajemen dalam memilih metode akuntansi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda disetiap perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat pembahasan tentang faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan *prudence* adalah bidang yang sangat luas, maka penulis memiliki sejumlah keterbatasan, terutama waktu, tenaga dan kemampuan akademik. Menyadari kondisi tersebut maka permasalahan penelitian ini dibatasi hanya pada *debt covenant*, *bonus plan*, dan *political cost* tahun 2010 – 2014 untuk 12 perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur sektor industri otomotif terhadap penerapan *prudence*.

## **D. Rumusan Masalah**

Dilihat dari permasalahan diatas, maka dapat diketahui bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *debt covenant* mempengaruhi penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

2. Apakah *bonus plan* mempengaruhi penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *political cost* mempengaruhi penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *debt covenant*, *bonus plan*, *political cost* mempengaruhi penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaruh *debt covenant* terhadap penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengkaji pengaruh *bonus plan* terhadap penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengkaji pengaruh *political cost* terhadap penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengkaji pengaruh *debt covenant*, *bonus plan*, *political cost* terhadap penerapan *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik penulis, investor dan calon investor, kreditor dan pihak lain. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *prudence* serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *debt covenant*, *bonus plan*, dan *political cost* terhadap penerapan *prudence* pada perusahaan.

### 2. Bagi Investor dan Calon Investor

Agar membantu para investor dan calon investor dalam membuat keputusan investasinya, sehingga lebih berhati-hati mengambil informasi yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan.

### 3. Bagi Kreditor

Untuk membantu kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kredit yang akan diberikan melihat pemakaian prinsip *prudence* yang diterapkan atau tidak oleh perusahaan.

### 4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan penerapan *prudence* pada perusahaan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan arah dan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka uraian sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Didalam bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV            GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Didalam bab ini akan dijelaskan dan dideskripsikan sejarah singkat perusahaan, aktivitas ekonomi perusahaan dan dipaparkan pula visi dan misi perusahaan.

#### **BAB V             HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini akan dijelaskan dan dideskripsikan objek penelitian, pengujian dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis, pembahasan hasil analisa data, temuan penelitian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

#### **BAB VI            KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.